

ANALISIS INKLUSI KEUANGAN PADA PELAKU UMK DI PASAR OESAPA KOTA KUPANG

Analysis of Financial Inclusion Among Micro And Small Enterprise (MSE) Actors In Oesapa Market, Kupang City.

Melfi Asri Kain^{1,a)}, Paulina Y. Amtiran^{2,b)}, Wehelmina M. Ndoen^{3,c)}, Petrus E. de Rozari^{4,d)}

^{1,2,3,4)}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} melfikain2002@gmail.com, ^{b)} paulina.amtiran@staf.undana.ac.id, ^{c)} wehelmina.ndoen@staf.undana.ac.id, ^{d)} petrus.rozari@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat inklusi keuangan pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Pasar Oesapa, Kota Kupang. Inklusi keuangan merupakan akses terhadap layanan keuangan formal yang menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan usaha dan peningkatan kesejahteraan pelaku UMK. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMK telah memiliki produk keuangan dasar seperti rekening tabungan dan kartu ATM, serta sebagian mulai menggunakan layanan keuangan digital seperti dompet elektronik dan mobile banking. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi digital, ketidakpastian pendapatan, dan keraguan terhadap prosedur pinjaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat inklusi keuangan pelaku UMK di Pasar Oesapa tergolong sedang, dengan kebutuhan akan edukasi keuangan dan penyederhanaan akses layanan keuangan formal.

Kata Kunci : Inklusi Keuangan, Usaha Mikro Kecil (UMK), Literasi Keuangan, Pasar Tradisional, Kota Kupang

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu anggota dari 11 Negara yang tergabung dalam ASEAN (*Association of South East Asia Nations*). Indonesia sudah dihadapkan dengan adanya (MEA) Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang telah dimulai pelaksanaannya pada akhir tahun 2015 tepatnya pada tanggal 31 Desember 2015. Masyarakat Ekonomi Asean akan menjadikan tantangan bagi Indonesia dengan adanya perubahan kawasan ASEAN yang menjadi pasar tunggal dan sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih fleksibel dan komperatif. UMK (Usaha Mikro Kecil) di nilai menjadi salah satu peranan penting untuk perekonomian ASEAN yang dibuktikan dengan 96% masyarakat ASEAN terdiri dari UMK (Rahayu, 2017).

Saat krisis global terjadi UMK di Indonesia tidak terpengaruh dengan krisis tersebut mengalami peningkatan, bahkan dari setiap tahunnya. Keberadaan UMK selama masa krisis ekonomi hingga kini mampu sebagai salah satu faktor penggerak utama perekonomian Indonesia (Prasetyo, 2008). Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, setelah terjadi krisis pada tahun 1997-1998 jumlah UMK tidak berkurang, bahkan terus mengalami peningkatan dan mampu menyerap 85 juta tenaga kerja bahkan sampai 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012, bahkan ditahun 2016 UMK berjumlah 61.656.547 unit, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 62.928.077 unit dan pada tahun 2018 jumlah pelaku UKM sebesar

1.271.529 unit. Data tersebut menjadikan bukti bahwa UMK merupakan pasar yang potensial untuk industri jasa keuangan, terutama bank untuk penyaluran pembiayaan. Bank Indonesia mulai tahun 2015 memberikan ketentuan yang mewajibkan perbankan untuk mengalokasikan atau pembiayaan kepada UMK sebesar 5% dan tahun 2016 sebesar 10%, dan naik 5% menjadi 15% pada tahun 2017 dan 20% (Bank Indonesia, 2016).

Badan Pusat Statistik menerangkan pada tahun 2016 kontribusi dari sektor UMK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 60,34%, menyerap tenaga kerja mencapai 89,2% dan menyediakan lapangan kerja hingga menyentuh angka 99 % (Putri, 2019). UMK adalah usaha produktif yang memiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Saat ini UMK dapat dikatakan sebagai ujung tombak bagi perekonomian di Indonesia karena dengan adanya UMK dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang besar dan juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran (Bakhtiar et al 2022). UMK, sebagai tulang punggung perekonomian banyak negara, berperan krusial dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Namun, disisi lain akses ke layanan keuangan formal sering kali menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di sektor.

Keunggulan UMK Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam. Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor. Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya.

Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumber daya alam maupun padat tenaga kerja. Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Tanpa adanya ekonomi yang kuat, suatu negara tidak akan memiliki kemampuan berkompetisi maupun menentukan nasibnya sendiri dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan seperti yang terjadi saat ini.

Inklusi keuangan adalah penyediaan kemudahan akses peniadaan hambatan dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan kepada lembaga keuangan formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya lembaga keuangan formal untuk seluruh lapisan masyarakat

khususnya kelompok masyarakat yang memiliki akses yang terbatas dari layanan keuangan formal. Inklusi keuangan diartikan sebagai sebuah program yang memperluas akses keuangan di Indonesia dan mampu menyediakan solusi bagi berbagai penyebab buruknya tingkat literasi keuangan. Inklusi keuangan disajikan sebagai agenda demi mengeliminasi berbagai kendala dalam menggunakan service layanan keuangan. Salah satu bidang yang menggunakan service tersebut adalah usaha mikro kecil, dan menengah (UMK) (atarwaman et al. 2023).

Hambatan masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan adalah tingginya unbankable (tidak memenuhi persyaratan pinjaman bank) yang disebabkan oleh kesenjangan kemiskinan, rendahnya pembiayaan UMK, tingginya suku bunga kredit mikro, kurangnya kemampuan manajemen UMK, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan, hal tersebut yang menjadikan penerapan inklusi keuangan penting (Nengsih, 2015). Muhadjir et al (2015) mengatakan bahwa yang menjadi faktor usaha kecil lebih sering menggunakan modal sendiri, keluarga, kerabat, bahkan rentenir dalam menjalankan usahanya karena rendah/sulitnya akses usaha kecil terhadap lembaga keuangan formal, dan tingkat suku bunga perbankan

Pasar Oesapa adalah salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasar ini menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di wilayah sekitarnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai pasar tradisional, Pasar Oesapa memainkan peran sentral dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari, untuk mendukung kegiatan perekonomian lokal usaha mikro kecil (UMK), serta menjadi tempat interaksi sosial masyarakat di Kupang. Pasar ini memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh menjadi sumber penghasilan utama bagi pedagang kecil, petani dan nelayan, menyediakan beragam produk lokal, seperti hasil pertanian, produk perikanan, dan kuliner khas. Dengan pengelolaan yang baik, Pasar Oesapa memiliki potensi untuk tumbuh dan menjadi pusat perekonomian yang lebih maju, untuk mendukung pengembangan UMK serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pedagang di pasar Oesapa digolongkan kedalam beberapa jenis yaitu pedagang yang memiliki kios, pedagang berlapak dan pedagang harian. Klasifikasi pedagang tersebut didapat dilihat pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1.
Data Klasifikasi Pedagang di Pasar Oesapa

| No | Jenis | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1 | Kios | 159 |
| 2 | Lapak | |
| | a. Ayam potong | 16 |
| | b. Daging babi | 1 |
| | c. Ikan | 112 |
| | d. Daging ayam | 12 |
| | e. Buah-buahan | 9 |
| | f. Sayur mayur dan bawang | 128 |
| | g. Daging sapi | 1 |
| | h. Pakaian RB | 4 |
| | i. Lapak penjual minuman | 7 |
| | j. Ikan kering | 2 |
| | k. Mol bumbu | 3 |

| | | |
|---|------------------------------------|-----|
| | l. Mol kelapa | 6 |
| | m. Kaset | 1 |
| | n. Bakso | 1 |
| | o. Nasi | 4 |
| 3 | Penjual Harian | 268 |
| 4 | Kios di bangun di tanah sewaan | 72 |
| 5 | Kios yang di kelola LPM Kel-Oesapa | 17 |
| | Total | 823 |

Sumber: Sumber Data Peneliti Pasar Oesapa, 2025

Berdasarkan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dimana peneliti menemukan bahwa pelaku UMK di Pasar Oesapa sekitar 10-15% masih menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas keuangan seperti rekening bank, kredit, dan asuransi. Kendala ini bisa meliputi keterbatasan pengetahuan mengenai produk keuangan, persyaratan administrasi yang rumit, dan minimnya infrastruktur keuangan yang memadai akibatnya, pelaku UMK sering kali terhadap dalam mengelola keuangan usaha mereka, mengembangkan usaha, dan menghadapi risiko yang ada.

Diantara UMK yang terdapat di Nusa Tenggara Timur (NTT), terkhususnya di Pasar tradisional, seperti pasar Oesapa, Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, tepatnya di Kota Kupang, merupakan pusat kegiatan ekonomi lokal yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Pelaku usaha di pasar ini biasanya terdiri dari UMK yang menjual berbagai barang dan jasa. Meskipun pasar-pasar ini berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi yang vital, banyak pelaku usaha di pasar tradisional masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal inklusi keuangan. Akses terbatas kelayanan perbankan, kurangi informasi mengenai produk keuangan, dan hambatan administratif sering kali menghalangi mereka dari memanfaatkan sumber daya keuangan dapat meningkatkan usaha mereka. Pelaku usaha di pasar oesapa umumnya terdiri dari UMK yang beroperasi dalam skala kecil, hingga menengah, dan mereka tantangan unik terkait dengan akses ke layanan keuangan formal

Pentingnya peneliti melakukan penelitian mengenai analisis inklusi keuangan di pasar Oesapa untuk memahami lebih dalam tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMK dalam mengakses layanan keuangan. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang kondisi keuangan mereka dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di pasar Oesapa. Dengan informasi ini, kebijakan dan program dapat dirancang untuk meningkatkan akses dan penggunaan layanan keuangan, mendukung pertumbuhan UMK, dan memperkuat ekonomi lokal secara keseluruhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

Financial Behavior adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan aplikasi keuangan. Menurut Arianti (2018) mengungkapkan bahwa financial behavior adalah suatu disiplin ilmu yang di dalamnya melekat interaksi berbagai disiplin ilmu dan secara terus menerus berintegrasi sehingga pembahasannya tidak dilakukan isolasi. Perilaku keuangan (*Financial Behavior*) merupakan isu yang banyak dibahas saat ini. Mereka cenderung berpikir jangka pendek dan identik dengan praktik belanja impulsif sehingga seringkali individu dengan

pendapatan yang cukup masih mengalami masalah finansial karena perilaku keuangan yang kurang bertanggung jawab.

Financial Behavior adalah kemampuan seseorang dalam mengatur (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan) dana keuangan sehari-hari. Perilaku manajemen keuangan dapat juga diartikan sebagai proses pengambilan keputusan keuangan, harmonisasi motif individu dan tujuan perusahaan. Perilaku manajemen keuangan berkaitan dengan efektivitas manajemen dana, dimana arus dana harus diarahkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun indikator dalam variabel ini, yaitu jenis-jenis perencanaan dan anggaran keuangan yang dimiliki, teknik dalam menyusun perencanaan keuangan, kegiatan menabung, kegiatan asuransi, pensiun dan pengeluaran tidak terduga, kegiatan investasi, kredit/hutang, dan tagihan, monitoring pengelolaan keuangan, dan evaluasi pengelolaan keuangan (Humaira dan Sagoro, 2018).

Anita Sari (2015) mengemukakan indikator financial behaviour atau perilaku keuangan adalah a) Membayar tagihan tepat waktu., b) Membuat anggaran pengeluaran dan belanja, c) Mencatat pengeluaran dan belanja (harian, bulanan, dan lain-lain), d) Menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga, e) Menabung secara periodic, f) Membandingkan harga antar toko atau swalayan atau supermarket sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian.

Pengertian Perilaku Keuangan

Perilaku keuangan merupakan keterampilan organisasi seseorang dalam merencanakan, menganggarkan, inspeksi, pengelolaan, kontrol dan penyimpanan dana keuangan harian (Prihastuty & Rahayuningsih, 2018) Perilaku keuangan merupakan aspek kemampuan keuangan yang digabungkan oleh aspek kemampuan psikologis individu untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber keuangan sebagai acuan untuk mengambil keputusan dalam perencanaan keuangan pribadi ataupun bisnis (Aji et al., 2020).

Konsep Literasi Keuangan

Konsep pada literasi keuangan dibagi menjadi 2 yaitu penggunaan (*finance application*), dan pemahaman (*finance knowledge*), dengan adanya pengetahuan keuangan yang dimiliki akan memudahkan individu tersebut dalam mengelola keuangannya dengan baik, seperti: bagaimana mengelola pendapatan untuk berinvestasi atau menggunakannya sebagai kebutuhan sehari-hari, yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menggunakan hasil dari investasi tersebut. (Halim & Astuti, 2015) menjelaskan bahwa pengetahuan keuangan merupakan keterampilan memahami, membuat analisis, dan mengelola keuangan bertujuan untuk menghasilkan keputusan keuangan dengan tepat untuk meminimalisir terjadinya persoalan keuangan.

Masalah tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki layanan keuangan diperbankan membuktikan bahwa perusahaan perbankan belum mampu menjangkau seluruh wilayah padahal ini akan menentukan bagaimana perilaku masyarakat dalam melakukan investasi, mengelola keuangan, seperti menyimpan uang dan melakukan penganggaran dengan baik dan bertanggung jawab.

Finance behavior akan berkaitan cara seseorang dalam melakukan dan memanfaatkan berbagai sumber keuangan yang tersedia bagi dirinya (Nababan & Sadalia, 2013), maka seseorang memiliki perilaku keuangan yang bertanggung jawab, akan cenderung menggunakan uang yang dimilikinya dengan lebih efektif, sehingga pada setiap perilaku keuangannya dapat memengaruhi kesejahteraan keuangannya.

Literasi keuangan merupakan tingkat pemahaman individu ataupun masyarakat mengenai bagaimana mereka mengelola keuangannya secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian yang dihadapi. Pengukuran literasi keuangan biasanya menggunakan indeks literasi keuangan sebagai ukuran dalam menentukan tingkat pengetahuan, kecekapan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, baik itu produk dan jasanya OJK, (2016).

Inklusi Keuangan

Bank Indonesia dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif mengartikan inklusi keuangan sebagai hak bagi setiap individu untuk memperoleh akses terhadap layanan lembaga jasa keuangan secara nyaman, tepat waktu, informatif, dan terjangkau, dengan menghargai martabat manusia secara penuh (Bank Indonesia, 2014). Konsep inklusi keuangan adalah situasi di mana masyarakat memiliki akses ke layanan jasa keuangan formal secara lancar, aman, dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Para peneliti seperti Hardiyanto dkk (2019), berpendapat bahwa inklusi keuangan merupakan upaya untuk memasukkan masyarakat yang belum terlibat dalam sistem keuangan formal, memberi mereka peluang untuk menikmati layanan seperti tabungan, pembayaran, dan transfer. Di sisi lain, Sarma mengartikan inklusi keuangan sebagai proses untuk menjamin akses yang mudah, ketersediaan layanan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh segmen masyarakat (Sarma, 2012).

Pada tahun 2010, Indonesia memulai upaya inklusi keuangan. Bank Indonesia mengeluarkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan (Nengsih, 2015). Dalam kerangka strategi ini, terdapat enam pilar inklusi keuangan, termasuk edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen. Inklusi keuangan menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meneguhkan stabilitas sektor keuangan (Ummah, Nuryartono, & Anggreani, 2015).

Dalam pendekatan berpusat pada masyarakat ini, sasaran utamanya adalah kelompok yang mengalami kesulitan mengakses layanan keuangan. Prinsip ini mengutamakan hak setiap individu untuk meraih layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Sasaran utama kebijakan ini mencakup masyarakat berpendapatan rendah, masyarakat miskin yang produktif, pekerja migran, dan juga daerah terpencil (Bank Indonesia, 2014).

Manfaat Inklusi Keuangan

Layanan inklusi keuangan memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat. Pertama, aksesibilitas dan kemudahan dalam mengakses pinjaman modal akan membuka peluang usaha

yang lebih luas, dan juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi bagi para pelaku usaha tersebut.

Kedua, jaringan yang terbuka ke sektor keuangan formal memungkinkan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, untuk mengakses berbagai jenis pinjaman usaha dan memanfaatkan produk bank serta asuransi dengan persyaratan yang lebih mudah.

Ketiga, kemudahan akses ke layanan keuangan formal akan mengurangi pertumbuhan praktik rentenir di kalangan masyarakat, yang biasanya memberlakukan pinjaman dengan bunga tinggi. Manfaat terakhir, rekening yang telah dibuka oleh masyarakat di lembaga keuangan formal dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan usaha di masa depan (Wahid, 2014).

Tujuan Inklusi Keuangan

Dalam Buku Saku Inklusif Keuangan (Bank Indonesia, 2014), terdapat sejumlah tujuan yang mendasari penerapan inklusi keuangan, di antaranya: Mengintegrasikan Inklusi Keuangan sebagai elemen strategis dalam pembangunan ekonomi pemerintah, upaya penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Menyajikan produk dan layanan keuangan formal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Membuka wawasan masyarakat terhadap berbagai opsi layanan keuangan. Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat ke layanan keuangan. Memperkuat sinergi di antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non-bank. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

Indikator Inklusi Keuangan

Mengacu pada penelitian Yanti (2019), terdapat beberapa indikator utama yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan. Indikator pertama adalah ketersediaan atau aksesibilitas, yang menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat menjangkau layanan keuangan secara mudah dan terjangkau. Indikator kedua adalah kualitas, yang berkaitan dengan mutu layanan keuangan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Selain itu, indikator kegunaan dan kesejahteraan juga menjadi faktor penting, di mana layanan keuangan tidak hanya digunakan secara aktif oleh masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi mereka.

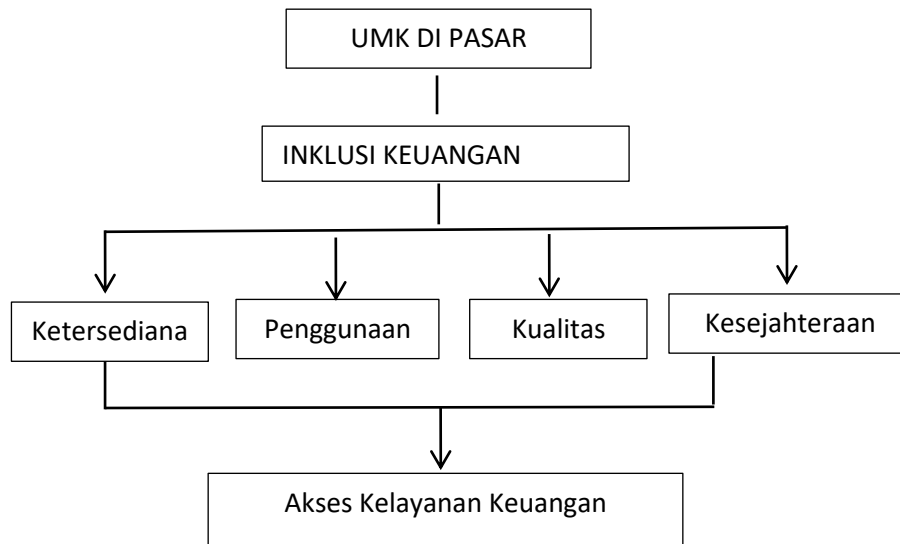
Usaha Mikro Kecil (UMK)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMK, Pasal 1 dari undang-undang tersebut, dinyatakan UMK atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut yang dimaksud usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

UMK adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dari penelitian “Analisis inklusi keuangan pada pelaku UMK di Pasar Oesapa kota kupang” dapat di lihat pada Gambar gambar di bawah ini.



Gambar 1.
Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara variabel inklusi keuangan terhadap pelaku UMK di Pasar Oesapa Kota Kupang. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel secara terukur dan objektif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMK yang beraktivitas di Pasar Oesapa Kota Kupang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah responden yang disesuaikan dengan kriteria penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang menggunakan skala ordinal untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel yang diteliti. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan dalam analisis data. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial dan simultan menggunakan uji t dan uji F, yang didukung oleh pendapat Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan data yang bersifat statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan membahas tentang Analisis Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMK Di Pasar Oesapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan pelaku UMK di Pasar Oesapa sebagian besar pelaku UMK mereka telah memiliki produk-produk keuangan secara

konvensional seperti, rekening tabungan dan kartu ATM untuk menyimpan hasil usaha, melakukan transaksi dan mengatur keuangan secara aman dan praktis. Hal ini mereka keterlibatan dalam sistem layanan keuangan formal. Bahkan beberapa pelaku UMK telah menggunakan dompet digital (e-wallet) seperti DANA dan aplikasi mobile banking seperti BRImo untuk mendukung usaha dan kehidupan sehari-hari mereka. Namun, demikian belum sepenuhnya pelaku UMK memanfaatkan layanan keuangan secara digital atau kompleks seperti e-wallet atau mobile banking dan tergantung pada tingkat pemahaman serta kenyamanan teknologi dari masing-masing individu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Pasar Oesapa berada pada tingkat menengah dan terbatas. Oleh karena itu, perlunya peningkatan literasi keuangan digital masih penting untuk mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang lebih luas dan modern di kalangan pelaku UMK. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2014) yang menyatakan bahwa inklusi merupakan hak bagi setiap individu untuk memperoleh akses terhadap layanan jasa keuangan secara nyaman dan tepat waktu.

Perilaku keuangan (*financial behavior*) pelaku UMK di Pasar Oesapa mencerminkan tingkat pemahaman dan kebiasaan mereka dalam mengelola keuangan usaha maupun pribadi. Sebagian besar pelaku UMK melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, seperti mencatat pengeluaran harian dan keuntungan secara manual. Praktik ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan, meskipun belum menerapkan sistem pencatatan yang sistematis dan terintegrasi. Kebiasaan ini sesuai dengan indikator perilaku keuangan yaitu, mencatatkan pengeluaran, membuat anggaran, menyediakan dana darurat dan menabung secara berkala. Namun demikian, terdapat pula pelaku UMK yang masih menyimpan uang di rumah dan enggan memanfaatkan produk pinjaman atau asuransi dari lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang tidak menentu, kurangnya pengetahuan tentang prosedur pinjaman, ketakutan terhadap bunga tinggi serta, serta persepsi mengurus pinjaman bank itu rumit. Sikap ini menunjukkan terhadap sikap risiko bahwa perilaku keuangan sangat dipengaruhi oleh sikap terhadap risiko, literasi keuangan dan pengetahuan individu. Beberapa pelaku UMK sudah memiliki pengetahuan tentang produk keuangan, seperti pinjaman mikro, asuransi kesehatan dan mobile banking juga menunjukkan perilaku yang modern dan strategis. Mereka mampu memanfaatkan fasilitas keuangan tidak hanya menyimpan uang, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan usaha, seperti menambah stok barang, memperbesar skala usaha, dan menghadapi kondisi darurat ini. Pelaku UMK di Pasar Oesapa mereka memperlihatkan dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga, mereka mampu mengelola keuangan lebih baik cenderung memiliki kestabilan usaha, dapat menyisihkan uang untuk keperluan mendesak.

Dengan demikian, perilaku keuangan pelaku UMK di Pasar Oesapa berada pada spektrum yang luas, mulai dari tradisional dan sederhana hingga cukup modern dan terstruktur. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi berbagai pihak, terutama lembaga keuangan dan pemerintah, memberikan edukasi dan pendampingan literasi keuangan yang lebih intensif. Dengan meningkatkan literasi dan perilaku keuangan yang baik, pelaku UMK lebih siap menghadapi risiko usaha, mengembangkan potensi bisnis.

Dari hasil penelitian, Secara keseluruhan, perilaku keuangan pelaku UMK di Pasar Oesapa mencerminkan fase transisi antara tradisional dan modern, di mana sebagian telah mulai beradaptasi dengan sistem keuangan formal, namun sebagian lainnya masih terhambat oleh faktor pengetahuan, akses, dan kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian, mengidentifikasi tingkat inklusi keuangan.

1. Ketersediaan/Aksesibilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pelaku UMK di Pasar Oesapa umumnya mereka memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal seperti bank dan koperasi. Fasilitas seperti ATM dan rekening tabungan telah tersedia dan digunakan oleh sebagian responden. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi ketersediaan, layanan keuangan di kawasan relatif cukup jangkau. Hasil ini sejalan dengan pendapat Sarma (2012) yang menyatakan bahwa ketersediaan layanan keuangan dapat di ukur dari akses kemudahan fisik dan keberadaan infrastruktur keuangan di wilayah tersebut.

2. Penggunaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun fasilitas keuangan tersedia, tingkat layanan keuangan yang lebih canggih masih terbatas. Responden cenderung menggunakan rekening tabungan dan ATM, sementara pengguna layanan keuangan seperti dompet digital dan mobile banking masih minim. Hambatan utama adalah kurangnya literasi digital dan kenyamanan terhadap metode konvensional. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Desiyanti (2016) yang menyatakan bahwa meskipun produk perbankan banyak tersedia, penggunaannya lebih optimal karena rendahnya literasi keuangan digital.

3. Kualitas

Dari hasil penelitian ini Kualitas layanan keuangan yang dirasakan pelaku UMK cukup baik, terutama dalam hal keamanan transaksi dan kemudahan akses. Namun, ada keluhan terkait prosedur pinjaman yang dianggap rumit dan bunga yang tinggi terutama di lembaga keuangan formal. Sebagian pelaku UMK lebih memilih meminjam dari koperasi minguan atau menggunakan uang pribadi karena lebih fleksibel. Ini sejalan dengan penelitian Riwayati (2017) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan tidak hanya terkait dengan akses, tetapi juga persepsi kualitas dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan terhadap pelaku usaha.

4. Kesejahteraan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dampak layanan keuangan terhadap kesejahteraan pelaku UMK bervariasi. Beberapa responden mengaku bisa menabung dan mengatur keuangan lebih baik berkat rekening bank. Namun, sebagian yang menyatakan bahwa penghasilan yang kecil bahwa mereka tidak mampu menabung, sehingga mereka tidak merasakan langsung peningkatan kesejahteraan. Hasil ini sejalan dengan temuan Wira Iko P. Yanti (2019) bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja dan kesejahteraan UMKM, tetapi efek tersebut sangat tergantung pada kemampuan ekonomi dasar pelaku usaha.

Perkembangan teknologi yang pesat dalam sektor layanan keuangan telah membawa berbagai dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya akses terhadap layanan keuangan formal, termasuk para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Pasar Oesapa. Bagi para pemilik usaha kecil, kemudahan, efisiensi

waktu, dan keamanan merupakan tantangan utama dalam melakukan transaksi, baik dengan konsumen maupun dengan pemasok. Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi, terutama dalam kategori pembayaran digital, telah memberikan solusi nyata terhadap hambatan-hambatan tersebut.

Dengan mengakses layanan keuangan formal seperti rekening bank digital, dompet elektronik, layanan pinjaman digital, serta sistem pembayaran seperti BRImo, para pelaku UMK kini dapat:

1. Melakukan transaksi secara non-tunai dengan cepat dan aman.
2. Mengurangi risiko kehilangan uang tunai.
3. Mencatat transaksi dengan lebih rapi dan transparan.
4. Memudahkan dalam pengajuan akses permodalan berbasis data transaksi digital.

Selain itu, keikutsertaan pelaku UMK dalam sistem keuangan formal juga mendorong mereka untuk meningkatkan literasi keuangan serta membangun rekam jejak finansial yang penting dalam pengembangan usaha ke depan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, (2022) yang menegaskan bahwa implementasi fintech minim hambatan dan kendala karna yang ditemukan pada beberapa manfaat dari para informan yang kemudian menyebabkan para pelaku usaha UMK memakai atau menggunakan mode pembayaran/transaksi berbasis teknologi selain karna mereka mendapat kemudahan dalam proses transaksi dengan pelanggan dan juga memberikan keuntungan bagi para pelaku UMK serta membantu meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM di Pasar Oesapa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai inklusi keuangan pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Pasar Oesapa, dapat disimpulkan bahwa tingkat inklusi keuangan berada pada kategori cukup baik, ditunjukkan dengan adanya akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal seperti rekening tabungan, ATM, dan sebagian menggunakan dompet elektronik. Meskipun sebagian besar pelaku usaha sudah mengenal dan menggunakan produk keuangan dasar, masih terdapat kendala seperti pendapatan yang tidak tetap, minimnya literasi digital, serta kekhawatiran terhadap proses pinjaman, yang menyebabkan tidak semua pelaku usaha dapat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. Dengan demikian, inklusi keuangan telah berjalan namun masih memerlukan peningkatan dalam hal edukasi, akses yang mudah, dan pendampingan usaha.

Saran

1. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan edukasi dan pelatihan rutin mengenai literasi keuangan, khususnya untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMK terhadap layanan keuangan digital dan manfaat produk-produk keuangan lainnya.
2. Penyederhanaan prosedur kredit dan pinjaman sangat diperlukan agar pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lengkap tetap dapat memperoleh akses modal usaha secara legal dan aman.

3. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku pasar untuk membangun sistem pendampingan usaha yang berkelanjutan serta memperkuat inklusi keuangan secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, D., & Wiksuana, I. G. (2018). Inklusi keuangan dalam hubungannya dengan pertumbuhan UMKM dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(12), 6420–6444. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/42823>
- Anik, A., & Ningsih, S. (2020). Analisis tingkat kesehatan Bank Mandiri Syariah dengan metode RGEC. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 724–732. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1466>
- Barus, B., & Pransiska, E. (2024). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro kecil (UMK) di Kecamatan Berastagi.
- Desiyanti, R. (2017). Literasi dan inklusi keuangan serta indeks utilitas UMKM di Padang. *Bisman: Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2(2), 122–134. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyz>
- Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). Model inklusi keuangan pada UMKM berbasis pedesaan. *JEJAK: Journal of Economics and Policy*, 6(2), 103–213. <https://doi.org/10.15294/jejak.v6i2.3885>
- Kasmir. (2002). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi ke-6). PT Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan*. <https://www.ojk.go.id>
- Kurniawan, H. (2020). *Pengaruh pemahaman fintech dan inklusi keuangan terhadap produktivitas UMKM di Kota Bandar Lampung* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Metro. <http://repository.ummetro.ac.id>
- Kusumaningtuti, S. S., & Setiawan, C. (2018). *Literasi dan inklusi keuangan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Laily, N. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku mahasiswa dalam mengelola keuangan. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(4). <https://doi.org/10.26675/jabe.v1i4.6042>
- Marlina, L., & Rahmat, B. Z. (2018). Peran lembaga keuangan syariah dalam implementasi keuangan inklusif bagi UMKM. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 162–171. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Maulana, B. R., Bachtiar, N. K., & Waharini, F. M. (2022). Pengaruh ketahanan usaha terhadap keberlangsungan UMKM. *UMMagelang Conference Series*, 819–832. <https://journal.unimma.ac.id>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nababan, D., & Sadalia, I. (2013). Analisis personal financial literacy dan financial behavior mahasiswa. *Media Informasi Manajemen*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyz>
- Rahayu, N. (2017). UMKM jadi kunci perekonomian ASEAN. <https://www.wartaekonomi.co.id>

- Ramadhan, F. (2022). *Peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah pada UMKM di Kota Makassar*. (Skripsi).
- Riwayati, H. E. (2017). Financial inclusion of business players in mediating MSMEs success. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 623–627. <https://www.econjournals.com>
- Sanjaya, I. M., & Nursechafia. (2016). Inklusi keuangan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(3), 281–306. <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i3.552>
- Santoso, A. B. (2018). Pengaruh disiplin kerja, motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Kreatif*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.32493/jk.v6i1.y2018>
- Santoso, R. T. (1996). *Mengenal dunia perbankan*. Andi Offset.
- Sari, A. N., & Kautsar, A. (2020). Pengaruh demografi terhadap inklusi keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(4), 1233–1246. <https://doi.org/10.26740/jim.v8n4.p1233-1246>
- Sarma, M., & Pais, J. (2012). Financial inclusion and development: A cross country analysis. *Journal of International Development*, 23(5), 613–628. <https://doi.org/10.1002/jid.1698>
- Sasmianti, E. (2018). *Analisis inklusi keuangan syariah pada pelaku UMKM*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fahlevi, M. S. I., Yusnaldi, & Irmalis, A. (2021). Strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat pedesaan. *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(2), 182–190. <https://doi.org/10.35308/jbkan.v5i2.3547>
- Siahaan, A. M., Siahaan, R., & Siahaan, Y. E. (2020). Faktor pendukung dan penghambat kinerja UMKM. *Jurnal Stindo Profesional*, 6(6), 143–156. <https://stindo-profesional.ac.id>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian bisnis*. Alfabeta.
- Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2006). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Salemba Empat.
- Ummah, B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2015). Analisis inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 1–27. <https://doi.org/10.29244/jekp.4.1.1-27>